



## Penutupan PPRA 51 Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 secara resmi pada Kamis (9/10) di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI... (selengkapnya hal. 12)



# Pilkada Langsung dan Tak Langsung dari Perspektif Media



Lemhannas RI kembali mengadakan acara *Coffee Morning* dengan pemimpin redaksi dan para wartawan media massa pada Rabu (24/9). Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji selaku Gubernur Lemhannas RI. Meskipun ini merupakan acara rutin yang diorganisir oleh Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI, kali ini *Coffee Morning* disajikan dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya, yakni dengan mengadakan dialog yang menunjukkan peran aktif para insan media.

Dengan tema “**Pilkada Langsung dan Tak langsung dari Perspektif Media**”, Lemhannas RI mencoba menggali pemikiran para insan media dalam isu yang saat ini sedang hangat, yakni mengenai pengesahan UU Pilkada yang banyak dikritisi oleh berbagai kalangan. Dimoderatori oleh Maulana Isnarto dari RRI, diskusi ini juga dibuka dengan paparan singkat mengenai kehidupan demokrasi seputar pemilu di Indonesia dari perspektif media oleh Tarman Azzam, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia.

“Pers adalah *tool* (alat) demokrasi bertugas untuk mengawal produk demokrasi, yakni pemerintah. Bila ‘sang produk’ melakukan kesalahan dan menyimpang dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang dipimpinnya, maka ‘sang alat’ harus segera menegur dan membela kepentingan masyarakat di muka pemerintah. Inilah tugas pers yaitu mengedukasi rakyat dengan selalu memihak kebenaran,” ucap Tarman Azzam.

Dalam kesempatan ini, para pemimpin redaksi dan wartawan yang hadir juga angkat bicara mengenai perspektif media yang menaunginya dalam memberitakan UU Pilkada. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara (langsung dan tak langsung), Lemhannas RI dan para insan media berdiskusi mengenai sikap yang harus diambil kedepan dalam menyikapi apapun keputusan DPR mengenai isu ini.

## DAFTAR ISI



**2** Pilkada Langsung dan Tak Langsung dari Perspektif Media



**3** Lawatan Tim Delegasi Kajian Lemhannas RI ke Korea Selatan



**4** Studi Banding Tim PPID Lemhannas RI dengan PPID di Tiga Kementerian



**5** Perluasan Kawasan Industri Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian



**5** Sosialisasi *Whistle-Blowing System* (WBS)



**6** Penataran Suami/Istri Para Peserta PPRA 51



**6** *Workshop* Pengukuran Ketahanan Nasional



**7** Strategi Persiapan Pemerintah Pusat & Daerah Menuju Komunitas ASEAN



**7** Transformasi Demokrasi Ekonomi dan Sosial Budaya



**8** Revitalisasi Kurikulum Sekolah Dalam Rangka Pembangunan Karakter



**8** Peringatan Idul Adha 1435 H di Lemhannas RI



**9** Revolusi Mental sebagai Paradigma Baru dalam Mencapai Tujuan Nasional



**10** Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV



**11** Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim



**11** Penutupan PPRA 51 Lemhannas RI



**12** Budi Susilo Soepandji Terima Bintang Mahaputera Adipradana

## REDAKSI

### Pengarah :

Komjen Pol Boy Salamuddin

### Penanggung Jawab :

Laksmi TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

### Redaktur :

Ir. Yusita Pusparini, M.Sc

### Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Maghoni.

### Redaktur Pelaksana :

Wahyu Widji Pamungkas S.Kom., MM.

Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos., Aditya Solehah S.Hum,

Aska Leonardi, M. I. Kom, Triana Rahmawaty, S.Hum.

### Desain

Bambang Iman Aryanto, S.T.

### Fotografer :

Suryadi, Sertu Mar Suyono, Dwi Jayanto

### Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indiah Winarni.

### Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.

### Alamat Redaksi :

Biro Humas Setama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan

No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>



# Lawatan Tim Delegasi Kajian Lemhannas RI ke Korea Selatan



Delegasi Tim Kajian Berlanjut Ditjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI melakukan lawatan ke Seoul, Korea Selatan selama dua hari pada tanggal 17 s.d. 18 September 2014. Tim ini terdiri dari Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Boy Salamuddin, Tenaga Profesional Bidang Strategi & HI Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr, Guru Besar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjajaran Prof. Yanyan M Yani, MAIRS, Ph.D, dan Kasubdit Regional Kolonel Sus Dr. Ir. Rudy AG Gultom, M.Sc.

Dalam lawatan dua hari di Negeri Ginseng tersebut, Tim Kajian Lemhannas RI bertandang ke dua instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan *Korea National Defense University* (KNDU). Kunjungan ini dilakukan berkenaan dengan kajian untuk mencari strategi persiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju komunitas ASEAN 2015 dalam rangka ketahanan nasional.

Pada hari pertama kunjungannya, Rabu (17/9), Delegasi Lemhannas RI melawat ke Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan diterima oleh oleh Mr. Suh Jeong-in, Director General, *South Asian & Pacific Affairs Bureau*, beserta para stafnya. Dalam pembicaraannya, Suh Jeong-In menyampaikan berbagai kebijakan umum luar negeri Pemerintah Korea Selatan terkait implementasi *ASEAN Community 2015* di kawasan ASEAN, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Indonesia yang memegang

peranan penting dan berhasil menjaga stabilisasi keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN.

Pemerintah Korea Selatan mengaku telah mempersiapkan berbagai proposal kerjasama di berbagai bidang, termasuk sumber pendanaannya (*fund*), guna meningkatkan hubungan baik dan kerjasama Korea Selatan dan Negara-negara ASEAN, terutama dengan Indonesia.

Menurut Suh Jeong-In, ada 31 (tiga puluh satu) proposal proyek kerjasama yang didanai oleh Pemerintah Korea Selatan, mulai dari aspek kerjasama *Transnational Crime, Capacity Building & E-Government, ICT, Disaster Management, Environment & Climate Change, People to People Contact, Social Welfare/Labour*, dan lainnya.

Sementara pada hari berikutnya, Kamis (18/9), Tim Kajian Lemhannas RI mengunjungi KNDU dan diterima oleh Rear Admiral Prof. Park Moon Young, *Dean of National Security College* of KNDU beserta para akademisi, serta 1 (satu) perwakilan Siswa KNDU dari Indonesia (Perwira TNI AU), Kolonel Pnb Joko Takaryanto.

Kunjungan Tim Kajian Lemhannas RI yang dipimpin oleh Sekretaris Utama ini juga merupakan kunjungan balasan delegasi KNDU ke Lemhannas RI pada hari Selasa, (2/9) awal September lalu. Park Moon Young sendiri sangat menyambut baik atas kedatangan Delegasi Lemhannas RI. Iapun berharap akan terjalin kerjasama di bidang pengkajian dimasa depan.

# Studi Banding Tim PPID Lemhannas RI dengan PPID di Tiga Kementerian

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lemhannas RI melakukan kunjungan ke tiga kementerian yang dipimpin oleh Kabag Humas Ir. Yusita Pusparini, M.Sc. pada hari Selasa, (23/9). Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi terutama yang terkait dengan strategi pelayanan informasi masyarakat.

Kunjungan pertama, dilakukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disambut oleh Dr. Suprawoto, SH, M.Si selaku Sekretaris Jenderal Kemkominfo RI. Dalam kunjungan ini, Yusita Pusparini menyatakan keinginan dari tim untuk menimba ilmu sebanyak mungkin tentang pengalaman PPID Kemkominfo terkait implementasi UU KIP. Menyambut keinginan tersebut Suprawoto menjelaskan kronologi pembentukan PPID di Kemkominfo serta contoh-contoh kasus dalam pelayanan permintaan informasi yang dihadapi oleh PPID Kemkominfo.

"Saat ini Kemkominfo masih memproses permintaan informasi dengan cara manual, yakni dicatat, diverifikasi dan dipenuhi melalui koordinasi dengan simpul-simpul PPID yang telah dibentuk. Tidak semua data yang ada, diunggah ke server PPID yang dapat diakses secara otomatis. Kami mengandalkan sistem manual karena kami ingin meminimalisir adanya kendala pelayanan informasi akibat pemadaman listrik sewaktu-waktu atau server mengalami crash atau

mati," ujar Sekjen Kemkominfo.

Setelah memperoleh informasi pengalaman serta peninjauan sarana PPID Kemkominfo, rombongan PPID Lemhannas bergerak menuju Kemenkeu RI. PPID Lemhannas kemudian disambut oleh Herry Siswanto selaku Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan. Dalam kunjungan ini, Herry Siswanto memberikan presentasi mengenai PPID Kemenkeu beserta kasus-kasus yang dialami dalam pemenuhan permintaan informasi, strategi pelayanan informasi, frekuensi permohonan informasi dalam satu tahun, informasi yang paling banyak diminta oleh pemohon serta prestasi yang telah diraih oleh PPID Kemenkeu.

Kunjungan terakhir rombongan PPID Lemhannas, adalah ke Kementerian Agama RI. Dalam kunjungan ini, rombongan Lemhannas bukan hanya mendapat penjelasan mengenai PPID Kementerian Agama RI yang usianya setahun lebih tua dari PPID Lemhannas, tetapi rombongan juga mendapatkan tur singkat mengenai ruang kerja khusus yang menjadi tempat pelayanan informasi PPID Kementerian Agama RI.

Acara Studi banding ini diikuti oleh tiga belas orang anggota PPID Utama Lemhannas RI yang terdiri dari perwakilan seluruh unit kerja. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan menambah wawasan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI sehingga dapat membangun sistem pelayanan informasi masyarakat yang sesuai dengan UU KIP secara lebih efektif, efisien dan terarah.



Foto : Humas Lemhannas RI



# Perluasan Kawasan Industri Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian



Foto : Humas Lemhannas RI

Direktorat Pengkajian Strategik Lemhannas RI, pada Kamis (25/9) mengadakan *Round Table Discussion* (RTD) dengan mengusung tema **“Konsep Perluasan Kawasan Industri dan Pemukiman Tanpa Alih Fungsi Lahan Pertanian Guna Menjaga Sustainable Development Dalam Rangka Ketahanan Nasional,”** yang bertempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. 4 Lemhannas RI. Hal ini berkaitan dengan telah di ambang pintunya kesepakatan komunitas ekonomi ASEAN tahun 2015.

Dalam *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E., berkaitan dengan permasalahan keberadaan industri sebagai suatu sistem yang diharapkan menjadi aktor penggerak pembangunan ekonomi nasional, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan industri ke seluruh wilayah nusantara, dimana pembangunan industri tidak akan lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Dr. Ir. Imam Haryono, M.Sc., Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian; Ir. Muhammad Said M.M. dari Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan; Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto M.SDAA., Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian; Dr. Rizari MBA M.Si., Direktur Kawasan dan Pertanahan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Bertindak sebagai penanggap pada RTD ini adalah Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Dr. Ir. Ozwar Muazin, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Antar Lembaga Dr. Ir. Rukhiyat Deni Jaka Permana M.Eng, Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc., sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Prof. Dr. Miyasto SU.

# Sosialisasi *Whistle-Blowing System* (WBS)

Dalam rangka aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Lemhannas RI bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan Sosialisasi *Whistleblowing System* (WBS) yang dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komisaris Jendral Polisi Boy Salamuddin. Hadir sebagai pemapar **“Whistleblowing System”** adalah Deputy Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Ir. Ikak Gayuh Patriastimo, MSP. pada Senin (29/9) di Ruang Gajah Mada.

WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *wihstleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi pengadaan barang dan jasa di internal institusi dimana sang *wihstleblower* bekerja.

Dalam paparannya, Ikak G. Patriastomo menyampaikan bahwa, **“Whistleblower** adalah seseorang dalam organisasi yang memiliki informasi tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam organisasi tersebut dan mengadukannya melalui mekanisme tertentu dalam WBS”. Mekanisme operasi WBS mencakup informasi yang masuk ditangani oleh tim verifikator. Sementara hasil penelaahan yang merekomendasikan tindak lanjut, disampaikan kepada APIP yang melakukan penilaian serta kelengkapan bukti sebelum diteruskan kepada penegak hukum sebagai pelanggaran tindak pidana.

Sebagai penutup, Boy Salamuddin menyampaikan bahwa, **“Tidak ada kata mundur bagi kita dalam dinamika perkembangan yang akan membawa Indonesia maju ini. Kita sebagai tulang punggung pelaksanaan pemerintahan harus menjadi bagian yang aktif dengan menyampaikan komitmen penuh dan terus mendukung operasional WBS khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari KKN.”**



Foto : Humas Lemhannas RI

# Penataran Suami/Istri Para Peserta PPRA 51

Selasa (30/9), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA., membuka acara Penataran Suami/isteri para Peserta PPRA 51 Tahun 2014 di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Penataran yang berlangsung selama enam hari ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan cakrawala pandang para suami/isteri sejalan dengan berkembangnya pengetahuan para peserta PPRA 51 setelah mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mempererat ikatan persaudaraan sesama isteri/suami peserta dan meningkatkan wawasan dan etika sebagai isteri/suami pemimpin tingkat nasional agar menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

Selama penataran, para peserta diberikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan sehingga dapat memahami makna moral dan etika kebangsaan yang selanjutnya dapat terimplementasi dengan baik dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak baik dalam organisasi, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.

Selain kegiatan dalam kelas, para peserta penataran ini juga melakukan kunjungan ke industri garmen dan industri makanan di kawasan industri Jababeka - Cikarang. Kunjungan ini dimaksudkan agar para peserta lebih memahami proses produksi pada kedua



Foto : Humas Lemhannas RI

industri tersebut dan lebih mengenal produk-produk yang dihasilkan.

Penataran Istri/Suami ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E. pada Selasa (7/10). Penutupan yang juga digelar di Gd. Dwi Warna Purwa ini dihadiri oleh para peserta penataran isteri/suami peserta PPRA 51, para peserta PPRA 51 dan para Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Profesional yang terlibat selama masa penataran.

# Workshop Pengukuran Ketahanan Nasional

Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI kembali menyelenggarakan *Workshop* tentang Ketahanan Nasional di Daerah dan Pembahasan Isu Strategis Nasional dan Wilayah pada Selasa (30/9). *Workshop* tahunan yang telah memasuki tahun kelimanya ini, terhitung dari tahun 2010, dibuka oleh Sekertaris Utama Lemhannas RI, Komisariss Jenderal Polisi Boy Salamuddin di Ruang Gajah Mada Gd. Panca Gatra Lemhannas RI.

Menurut laporan Ketua Labkurtannas, Prof. Dr. Miyasto, S.U., partisipasi peserta tahun ini bertambah menjadi 34 provinsi, dengan keikutsertaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang termuda. Miyasto juga menyampaikan bahwa *workshop* ini diikuti oleh unsur Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Negeri dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah keseluruhan sebanyak 76 orang peserta.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan *workshop* ini, **pertama**, *review* dan validasi sistem pengukuran ketahanan nasional dan kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh Lemhannas RI. **Kedua**, membahas potret ketahanan nasional di daerah. **Ketiga**, menganalisis isu-isu strategis wilayah. **Keempat**, merumuskan

rekomendasi kebijakan publik dalam rangka menanggulangi isu-isu strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Boy Salamuddin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada peserta dari seluruh provinsi yang selalu aktif dalam *workshop* ini. Ia menyampaikan, "Eksistensi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional ini sangat bergantung pada kontribusi saudara-saudara sekalian. Kami di Lemhannas sangat berharap saudara-saudara dari setiap provinsi dapat membantu kami dalam *mensupport* data untuk analisis yang lebih maksimal."



Foto : Humas Lemhannas RI



# Strategi Persiapan Pemerintah Pusat & Daerah Menuju

**D**irektorat Pengkajian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI, pada Selasa (30/9) menyelenggarakan *Round Table Discussion* (RTD) Kajian Berlanjut 1 dengan mengusung tema **“Strategi Persiapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menuju komunitas ASEAN dalam rangka Ketahanan Nasional,”** yang bertempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari seluruh peserta diskusi terutama oleh para pakar yang diundang guna penyempurnaan naskah sementara ini.

Dalam *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E. dikatakan, bahwa pemerintah secara aktif dan komprehensif sudah berupaya keras dalam rangka menyikapi ASEAN *Community* melalui beragam kebijakan dan strategi. Namun demikian, harus diakui momentum tersebut belum sepenuhnya dimengerti dan dipahami oleh semua pemangku kebijakan di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, HR. Agung Laksono, Asdep Kerjasama Regional dan Sub Regional Kementerian Koordinator Perekonomian RI Huda Bahweres MPA, Deputi 6 bidang Kesbang Kemenkopolkhukam Ir. Arif Mukiat, serta Staf Ahli Bidang



Hubungan Internasional Kementerian Koperasi dan UKM, Dr. Ir. Muhammad Taufik M.Sc.

Bertindak sebagai penanggap pada RTD ini adalah Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri I Gusti Agung Wesaka Puja, Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Deputi Bidang Budaya dan Kepariwisata Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Sylviana Murni, dan Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rahardjo Jamtomo. Sedangkan yang bertindak sebagai moderator adalah Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Iptek Lemhannas RI, Ir. Kurdinanto Sarah M.Sc.

## Transformasi Demokrasi Ekonomi dan Sosial Budaya

**P**ada Kamis (2/10) peserta PPRA 51 Lemhannas RI menyelenggarakan seminar bertajuk **“Transformasi Demokrasi Ekonomi dan Sosial Budaya Guna Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian dalam Rangka Ketahanan Nasional”**. Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. selaku Gubernur Lemhannas RI secara resmi membuka acara yang diadakan di Gd. Dwi Warna Purwa. Acara ini merupakan salah satu acara puncak bagi para peserta pendidikan reguler Lemhannas RI sebelum mereka menyelesaikan masa pendidikan selama 7,5 bulan di Lemhannas.



Acara ini dibuka dengan pembacaan naskah paparan yang telah disusun oleh seluruh peserta PPRA 51 mengenai langkah-langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia guna memajukan perekonomian dan kemajuan di segala aspek demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

“Hasil dari penelitian dan pemikiran bersama para peserta pendidikan Lemhannas ini tentunya sangat bermanfaat dalam usaha peninjauan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia serta konflik yang menyangkut aspek-aspek tersebut. Hal ini secara langsung dan tak langsung tentunya juga akan menjadi bahan tambahan bagi Lemhannas dalam kajian-kajian strategis yang hasilnya akan direkomendasikan kepada presiden. Seminar ini sendiri bersifat semi tertutup meski di kemudian hari nanti tentunya hasil penelitian juga akan disebarluaskan ke berbagai pihak”, ujar Gubernur Lemhannas RI.

Seminar ini menghadirkan empat orang narasumber dan dua penanggap, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Guru Besar Ekonomi UGM Prof. Dr. Sri Adiningsih, M. Sc., Guru Besar FISIP UI Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Ph. D, dan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar. Keseluruhan acara ini sendiri dimoderatori oleh Parulian Sihotang, Ak, M.Acc. Dip Res, Ph.D. Seminar ini diharapkan dapat memperkaya dan menyempurnakan naskah yang telah disusun oleh seluruh peserta PPRA 51.

# Revitalisasi Kurikulum Sekolah Dalam Rangka Pembangunan Karakter

Berempat di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. 4, pada Kamis (2/10), Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI melalui Direktorat Pengkajian Sosial Budaya menyelenggarakan *Round Table Discussion* (RTD) yang mengusung tema **“Revitalisasi Kurikulum Sekolah-Sekolah Internasional Guna Peningkatan Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional,”**.

Makin besarnya keprihatinan terhadap kondisi karakter bangsa dewasa ini, menimbulkan kuatnya urgensi peningkatan pembangunan karakter bangsa dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mencermati kondisi tersebut, Lemhannas RI dalam perannya, bidang kajian strategis, melaksanakan kajian tentang permasalahan tersebut dan merekomendasikan saran dan upaya terkait secara komprehensif, integral, holistik dan sistemik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, bangsa yang bermartabat, dan keunggulan bangsa di masa yang akan datang.

Dalam *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi S.E., dijelaskan pentingnya peran pendidikan karakter sebagai bagian dari jati diri bangsa, sehingga diperlukan penataan dan restrukturisasi pendidikan agar mampu membangun manusia yang berkarakter Pancasila.

“Saya menaruh harapan besar kegiatan RTD pagi ini akan mampu memberikan kontribusi bagi para pemangku kepentingan terkait,



Foto : Humas Lemhannas RI

untuk membenahi sekaligus membangun sistem pendidikan nasional yang ideal dan sejalan dengan kebijakan maupun program yang telah dicanangkan pemerintah,” tegas Dede Rusamsi.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Furqon, Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif MA. Ph.D, Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Theresia K. Brahim. Sementara yang bertindak sebagai penanggap pada RTD ini adalah Pengajar Sekolah Pasca Sarjana dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN, Muhammad Zuhdi M.Ed. Ph.D, Direktur Pendidikan Karakter *Education Consulting*, Doni Koesoema A M.Ed., dan para Tenaga Ahli Lemhannas RI.

## Peringatan Idul Adha 1435 H di Lemhannas RI

Dalam rangka memperingati Idul Adha 1435H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di samping Masjid Sudirman, Lemhannas RI pada Senin (6/10). Acara ini diawali dengan laporan Ketua Panitia penyembelihan hewan kurban, Kolonel Kes Saefullah, S.E., M.Sc. yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Gubernur Lemhannas RI oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E.

Hadir dalam acara ini segenap pejabat Lemhannas RI, pengurus Perista dan Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL). Dede Rusamsi menyampaikan bahwa kurban yang setiap tahun diselenggarakan tersebut, bukan hanya sekedar wujud solidaritas sosial kepada masyarakat yang kekurangan, namun lebih kepada wujud dari ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan ajaran-ajarannya.

Pada tahun ini, Lemhannas RI menerima hewan kurban dari

para anggota IKAL, alumni dan peserta PPRa, serta para pejabat dan anggota Lemhannas RI dengan jumlah total sebanyak 16 ekor sapi dan 14 ekor kambing. Daging kurban sendiri, dibagikan kepada Bintara, Tamtama, dan PNS Golongan I dan II Lemhannas RI dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar.



Foto : Humas Lemhannas RI



# Revolusi Mental Sebagai Paradigma Baru Dalam Mencapai Tujuan Nasional



Foto : Humas Lemhannas RI

**B**iro Humas Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan *talkshow* di Metro TV pada Kamis (2/10), yang mengangkat tema “**Peran Lemhannas dan Revolusi Mental**”. Sejak lahirnya era reformasi tahun 1998 lalu hingga kini, selama proses pencapaian tujuan nasional muncul berbagai eksekusi baik hal yang negatif maupun positif. Kendati demikian, bangsa ini tidak perlu menghentikan proses reformasi yang sudah lebih dari sepuluh tahun berjalan. Bangsa ini hanya perlu melakukan tindakan korektif, dengan melaksanakan paradigma baru yang lebih manusiawi.

Menurut Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta M.Sc., dari hasil temuan Lemhannas RI melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional mengenai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia mendapat rapor kuning, terutama di bidang ideologi dan sosial budaya.

Dalam pengukuran ketahanan nasional, indikator angka ketahanan nasional diukur dengan spektrum nilai 1 sampai 5. “Nilai 5 menunjukkan ketahanan nasional yang sangat tangguh, sementara kondisi kita saat ini hanya mencapai nilai 2,4. Jadi sangat *urgent* untuk diperbaiki. Hal yang cukup menonjol adalah indikator toleransi. Hasilnya menunjukkan, bahwa intoleransi yang terjadi saat ini, sangat tinggi. Oleh karenanya kita memang perlu berbicara mengenai masalah sumber daya manusia dalam konteks karakter dan mental bangsa,” jelas Putu Sastra.

Senada dengan Putu Sastra, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Agus Brotosusilo menambahkan, bahwa bangsa ini perlu melihat kembali perjalanan reformasi. Menurutnya, ketertinggalan bangsa ini terjadi karena eksekusi dari reformasi itu bukan

hanya positif, tetapi juga negatif. “Mungkin reformasi sudah *on the right track*, tapi sesuatu yang *on the right track*, bisa *in the wrong direction*. Maka dari itu perlu terobosan,” kata Agus Broto.

Terobosan yang dimaksud pada acara yang dipandu oleh Chandra Dewi tersebut adalah Revolusi Mental. Adanya program Revolusi Mental yang digadang-gadang oleh presiden terpilih mendatang, dapat menjadi terobosan untuk mengembalikan arah reformasi ke arah yang benar. Peran serta Lemhannas RI dalam mendukung program Revolusi Mental sangatlah dibutuhkan.

Lebih lanjut Agus mengatakan, masalah toleransi ini berkaitan dengan watak serta jati diri. Menurutnya, bangsa ini belum mencapai tujuan proklamasi, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur. “Kondisi saat ini, ideologi bangsa telah diboncengi oleh penumpang gelap yang disebut liberalisme” lanjutnya.

“Mulainya boleh dari birokrasi, tapi sebenarnya revolusi mental itu diperlukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penafsiran revolusi ini bukan tindakan kekerasan, tapi berkaitan dengan batin dan watak. Jadi bukan hanya pimpinannya saja, setelah mengalami salah arah reformasi, masyarakat perlu diingatkan kembali,” tegas Agus.

Putu Sastra menambahkan upaya untuk merubah watak dan mental bangsa Indonesia ini tidaklah cukup diserahkan hanya kepada Lemhannas RI saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Namun demikian, Lemhannas RI dapat menjadi institusi terdepan untuk melakukan revolusi mental. “Diperlukan peran serta dari semua pihak supaya gaweb besar (Revolusi Mental) ini bisa berhasil,” pungkaskan Putu Sastra.

# Upacara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Eselon I, II, III dan IV



Foto : Humas Lemhannas RI

Pada bulan Oktober ini, Lemhannas RI kembali menyelenggarakan acara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Pejabat Eselon I, II, III dan IV pada Kamis (9/10). Gubernur Lemhannas RI selaku pemimpin upacara, melantik 11 perwira tinggi TNI, 2 perwira tinggi Polri, dan 6 pejabat eselon III dan IV untuk melaksanakan tugas di lingkungan Lemhannas RI.

Beberapa pejabat baru yang dilantik dalam acara ini antara lain Mayjen TNI Sunindyo yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi, Mayjen TNI Dodi Usodo Hargo S., S.Ip, MM. sebagai Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional, Brigjen TNI Asrobudi, S.Ip. sebagai Direktur Pemantapan Semangat Bela Negara Debidatplaikbs, Kolonel Laut (E) Drs. Rosehan Chaidir sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ideologi, AKBP Jabinson Purba, S.H. sebagai Kabag Kerjasama Internasional Rokerma Settama, AKBP Dra. Sri Suari, M.Si. sebagai Kasubdit Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat, dan AKBP Sri Sukriyati, S.H., M.M. sebagai Kasi Evpor Subdit Ideologi, Politik, Dan Demokratisasi Ditjian Politik Debidjianstrat Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Budi Susilo Soepandji menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat yang mutasi ke intansi yang baru. Para pejabat yang dimutasi tersebut diantaranya adalah Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro yang menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Toto Rinanto Sudjiman sebagai Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Y. Eddy Kristiyatmo sebagai Pati Mabes TNI AD, Irjen Pol Drs. Johny Mangasi Samosir, M.Sc. sebagai Waka Bareskrim Polri, Brigjen TNI Edy Rahmayadi sebagai Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad dan Laksma TNI Sugeng Supriyanto sebagai Staf Khusus Kasal.



# Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim



Lemhannas RI bekerjasama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dan Chandra Motik *Maritime Center* mengadakan acara Simposium Maritim dengan tema **“Membangun Indonesia Sebagai Poros Maritim Menuju Kedaulatan Bangsa,”** pada Kamis (9/10) di Auditorium Lemhannas RI.

Acara yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji D.E.A. menghadirkan pembicara antara lain Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, Ketua Umum Iluni UI Dr. Hj. Chandra Motik Yusuf SH. M.Sc., Ahli Hukum Internasional Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Ahli Ilmu Pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakri dan Tenaga Profesional Bidang Strategi & HI Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengatakan, Simposium Maritim ini bukan kegiatan simposium akademis semata guna mendukung visi dan misi pemerintahan mendatang, tetapi

lebih dari itu simposium ini adalah momentum untuk menggelorakan pemikiran cerdas dan strategis berbasis pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai bangsa bahari.

“Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya,” jelas Budi Susilo.

Dalam simposium ini dibahas hal-hal antara lain tentang konsep Poros Maritim Dunia dari pemerintahan baru, Keterkaitan konsep Poros Maritim tersebut dengan hukum internasional dari sisi hubungan diplomatik antarnegara, batas laut, ZEE dan konflik perbatasan. Selain itu juga dibahas masalah keterkaitan konsep Maritim dengan Sistem Ketahanan nasional Indonesia terhadap kejahatan dan kriminalitas di laut, potensi bisnis kelautan yang bisa dikembangkan maupun kendala dan permasalahannya serta sistem infrastruktur kelautan.



# Penutupan PPRA 51 Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 secara resmi pada Kamis (9/10) di Gd. Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. Pendidikan yang telah berlangsung selama 7,5 bulan sejak tanggal 25 Februari 2014 ini meluluskan 94 orang peserta. Penutupan ini turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Deputy Pendidikan, Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Sekretaris Utama, dan Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Agum Gumelar.

Pada acara penutupan ini, Lemhannas menganugerahkan piagam penghargaan Wibawa Seroja Nugraha kepada lima orang peserta pendidikan yang memiliki nilai tertinggi dan telah lulus uji komprehensif oleh penguji. Lima orang tersebut ialah 1) Parulian Sihotang, PhD, 2) Kolonel (Inf) Cecep Rahmat Mujono, M. Sc., 3) Ir. Hamlie, M.E. 4) Kolonel (Pnb) Trisno Hendradi, dan 5) Kolonel Laut (P) Roberth Wolter Tappangan, S.H.

Selain penghargaan Wibawa Seroja Nugraha, penghargaan juga diberikan kepada peserta yang memiliki nilai tertinggi urutan 6-11 dengan Predikat Andalan. Mereka itu adalah 1) Kolonel (Pnb) Umar Sugeng H, S.IP, SE, 2) Kolonel Laut (P) Agung Prasetyawan, 3) Dr. Blucer Wellington Rajagukguk, SE, SH, M.Sc, CFE, Ak., 4) Kolonel Laut (T) Riyadi Syahardani, dan 5) Jonson Hutajulu, SH.



dan 6) Kolonel (Inf) Santos G Matondang, S.IP, MM. Selain itu, Lemhannas RI juga memberikan penghargaan kepada satu peserta asing yang meraih peringkat tertinggi, yang pada kali ini diberikan kepada peserta dari Malaysia, Brigjen Dato' Tengku Ahmad Nor Bin Tuan Chik.

Dalam acara ini, Agum Gumelar selaku Ketua Umum IKAL juga mengingatkan kepada peserta bahwa tugas seorang alumni Lemhannas akan makin berat di masa mendatang karena harus senantiasa menjaga nama baik Lemhannas dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

# Budi Susilo Soepandji Terima Bintang Mahaputera Adipradana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menganugerahkan tanda kehormatan kepada 68 tokoh bangsa pada Senin (13/10). Sebanyak 32 tokoh yang didominasi oleh Menteri dan mantan Menteri menerima Bintang Mahaputera Adipradana. Sementara 24 tokoh lainnya menerima Bintang Mahaputera Utama yang terdiri dari terdiri atas pejabat eselon I kementerian, 6 tokoh menerima Bintang Mahaputera Nararya, dan 6 tokoh menerima Bintang Jasa Nararya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/TK/Tahun 2014, penerima Bintang Mahaputra Adipradana di antaranya adalah Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Muhamad Lutfi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sutarjo, Menkumham Amir Sjamsuddin, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya, Menkeu Chatib Basri, dan Menpora Roy Suryo. Kemudian, pejabat setingkat menteri yang juga menerima Bintang Mahaputra Adipradana, antara lain, Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, dan beberapa mantan Pejabat Negara lainnya.



Adapun penerima Bintang Mahaputera Utama, diantaranya adalah Sjafrie Sjamsoeddin, Bambang Susantono, Bayu Krisnamurthi, Ali Ghufroon Mukti, Wiendu Nuryanti, Eko Prasajo, Denny Indrayana, Fasli Jalal, Bambang Brojonegoro, dan Dino Patti Djalal. Sementara, penerima Bintang Mahaputera Nararya adalah Moermahadi Soerja Djanegara, Ali Masykur Musa, Agung Firman Sampurna, Bahrullah Akbar, Agus Joko Pranomo, dan Tanribali Lamo. Selain itu, Presiden SBY juga menganugerahkan Bintang Jasa Nararya untuk enam tokoh yang dinilai berjasa dalam pengembangan Papua yaitu Karrel Sesa, Herman Saud, Elli Ujo (alm), Frans Alexander Wospakrik (alm), Titi Yuliana Marey, dan Fibiola Irianni Ohei.